

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR HARTA MANDIRI
TAHUN 2021**



**JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru
TELEPON: (0761) 856756, (Hunting),32656**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan Berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Adapun penjelasannya sebagaimana akan dibahas pada laporan ini.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Harta Mandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 10 Maret 2016, POJK No.13/ POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/S Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO). Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 14 Desember 2020.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: JANSEN LINGGA
	Jabatan	: Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang-undangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan. 8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada. 9. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 11. Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 		
2.	Nama	: ALI SYAHBANA
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang undangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan 		



- atau lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan.
 8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada.
 9. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan
 10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
 11. Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pencapaian Rencana Bisnis Bank seperti:
1. Mengefektifkan Agen Pemasaran dan apabila kurang mampu, maka lakukan penambahan agen dengan komisi atau insentif yang lebih menarik
 2. Memperluas area pemasaran dengan mempertimbangkan cara maintenance serta cost yang keluar.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: SIM ENG LIAN
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 	
2.	Nama	: SUAINIE

Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
Melakukan kunjungan dan meminta pelaporan pencapaian target dan realisasi serta tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	

BPR tidak Memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR Tidak memiliki Formulir Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR Tidak memiliki Formulir Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JANSEN LINGGA	Rp100.000.000,00	10%

2.	ALI SYAHBANA	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direktur utama memiliki saham 10%, sedangkan direktur operasional tidak			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JANSEN LINGGA			
2.	ALI SYAHBANA			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JANSEN LINGGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ALI SYAHBANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JANSEN LINGGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ALI SYAHBANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi pada BPR tidak memiliki Hubungan Keluarga				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIM ENG LIAN	Rp400.000.000,00	40%
2.	SUAINIE	Rp500.000.000,00	50%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			
1. Suainie persentase kepemilikan saham sebesar 50%			
2. Sim Eng Lian persentase kepemilikan saham sebesar 40%			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SIM ENG LIAN			
2.	SUAINIE			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	SIM ENG LIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUAINIE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	SIM ENG LIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUAINIE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp354.000.000,00	2	Rp168.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp129.706.012,00	2	Rp14.000.000,00
3.	Tantiem	2	Rp29.500.000,00	2	Rp14.000.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp513.206.012,00		Rp196.000.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan Kesehatan (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas Tunjangan Kesehatan bagi direksi ditahun 2021 sebesar Rp. 13.788.533,-			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.95 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.56 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.77 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.85 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.	

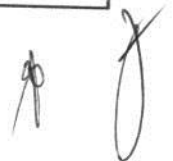
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	18 Maret 2021	3	Topik/Materi Pembahasan: Isu-Isu Strategi BPR Hasil Keputusan Rapat 1. Dari laporan keuangan sampai dengan 28 Februari 2021 baki debit kredit mengalami penurunan. Dimana pada akhir tahun 2020 sebesar Rp. 14.305.548 pada akhir february 2021 menjadi Rp. 13.304.075. 2. Membahas hasil laporan keuangan Audit KAP tahun buku2020. 3. Dimasa pandemi covid-19 agar penyaluran kredit lebih prudent. 4. Outstanding kredit bermasalah mengalami penurunan , dan NPL juga mengalami penurunan.
2.	08 Juni 2021	3	Mengevaluasi/ Menetapkan Kebijakan Strategis dan Kinerja PT. BPR Harta Mandiri Hasil Keputusan Rapat 1. Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara

			<p>rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka seluruh Dewan Komisaris bersepakat melakukan evaluasi kinerja BPR Harta Mandiri dan pembahasan mengenai kredit bermasalah, sampai tanggal 31 Mei 2021 19.33%, NPL dari BPR Harta Mandiri masih belum berhasil diturunkan sesuai target yaitu sebesar 12,08%, Salah satu penyebabnya adalah karena adanya kondisi Covid-19 dan menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi seiring pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga juga berpengaruh terhadap kesanggupan bayar debitur bermasalah.</p> <p>2. Laba pada tanggal 31 Mei 2021 telah tercapai sebesar Rp 222.631 masih jauh untuk mencapai target laba Juni 2021 yaitu sebesar Rp 335.352 . Direksi diminta perhatiannya agar target laba pada bulan Juni 2021 tercapai.</p> <p>3. Untuk pencairan kredit agar lebih prudent dimasa pandemi covid-19 yang masih belum berakhir .</p> <p>4. Menindaklanjuti temuan OJK, Direksi diminta agar segera memenuhi kekosongan Pejabat Eksekutif Marketing dan menjajaki potensi penyaluran dana pada komunitas / kelompok debitur.</p>
3.	03 Agustus 2021	3	<p>Mengevaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Semester I dan Pembahasan APU PPT</p> <p>Hasil Keputusan Rapat</p> <p>1. Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka seluruh Dewan Komisaris bersepakat melakukan evaluasi realisasi rencana bisnis BPR dan pembahasan mengenai kredit bermasalah:</p> <p>a. Penyaluran kredit yang masih belum mengalami kenaikan dan masih cukup jauh dari target outstanding penyaluran kredit yaitu sebesar Rp. 16,083,890 sedangkan yang terealisasi sampai dengan Juni 2021 yaitu sebesar 12.382.532 dikarenakan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya normal dikarenakan adanya pandemi covid-19.</p> <p>b. Outstanding kredit bermasalah yang belum dapat mencapai target RBB Semester I 2021 sebesar 12,08% dan yang terealisasi yaitu 17,99% . Direksi diminta perhatiannya dan agar menerapkan prinsip kehati hatian dalam penyaluran kredit terutama penyaluran kredit pada masa pandemi covid-19 ini dan fokus untuk penurunan kredit bermasalah.</p> <p>c. Laba masih belum tercapai karena peningkatan pembentukan cadangan PPAP.</p> <p>d. Pembahasan Kredit Bermasalah .</p> <p>2. Melakukan Inhouse training APU PPT oleh PE</p>

			APU PPT dalam waktu dekat .
4.	07 Oktober 2021	3	<p>Mengevaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Semester II</p> <p>Hasil Keputusan Rapat</p> <p>1. Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka seluruh Dewan Komisaris bersepakat melakukan Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR dan pembahasan mengenai :</p> <p>a. Penyaluran kredit yang masih belum dapat mencapai target RBB pada semester II sebesar Rp 17.384.796 dan terealisasi yaitu sebesar Rp 15.424.685. Direksi diminta perhatiannya agar target penyaluran kredit sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian .</p> <p>b. NPL kredit bermasalah yang belum dapat mencapai target RBB pada semester II sebesar 9,98% dan yang terealisasi yaitu 12,14%. Direksi diminta perhatiannya dan agar target untuk penyelesaian kredit bermasalah sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai.</p>
5.	02 Desember 2021	9	<p>Menyetujui dan Menetapkan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) Tahun 2022</p> <p>Hasil Keputusan Rapat</p> <p>Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh Dewan Komisaris bersepakat untuk menyetujui dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. Target outstanding penyaluran kredit sampai dengan Desember 2022 di proyeksikan sebesar Rp. 22,6M ;</p> <p>2. Target outstanding penghimpunan dana dalam bentuk :</p> <p>a. Tabungan sampai dengan Desember 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 6,6 milyar;</p> <p>b. Deposito sampai dengan Desember 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 13 milyar;</p> <p>3. Target NPL sampai dengan Desember 2022 sebesar 6,98%;</p> <p>4. Target Aset sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp.32.1 milyar;</p> <p>5. Target Laba Usaha sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp.1,1 milyar ;</p> <p>6. Secara keseluruhan semua target yang ada dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2022</p>
6.	18 Maret 2021	3	<p>1. Pembagian Bonus Laba usaha tahun 2020</p> <p>2. Remunerasi pengurus BPR Harta Mandiri tahun 2021</p>
7.	18 Maret 2021	3	<p>1. Pengesahan laporan keuangan perseroan</p> <p>2. Pengesahan laporan laba rugi tahun buku 2020.</p>



			3. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2021
8.	26 April 2021	3	<p>1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan (Bank Perkreditan Rakyat) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 62/POJK.03/2020</p> <p>Pertama : Menyetujui untuk mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan (Bank Perkreditan Rakyat) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.</p> <p>Kedua : Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan (Bank Perkreditan Rakyat)</p>
9.	03 Mei 2021	3	<p>1. Pelaksanaan Tugas Harian Direktur Akan Dilaksanakan Oleh Direktur Utama Selama Direktur Menjalani Karantina Yang Dikarenakan Positif Covid-19.</p> <p>Hasil Keputusan Rapat</p> <p>Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Pertama : Menyetujui pelaksanaan tugas harian Direktur akan dilaksanakan oleh Direktur Utama selama Direktur menjalani karantina yang dikarenakan positif Covid-19.</p> <p>Kedua : Selama Direktur Utama melaksanakan Tugas Harian Direktur, pelaksanaan Opini Kepatuhan hanya dilakukan sampai dengan Pejabat Eksekutif Kepatuhan.</p>
10.	18 Mei 2021	3	<p>1. Direktur PT. BPR Harta Mandiri dapat kembali bekerja dan dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Awal Bros A. Yani.</p> <p>Hasil Keputusan Rapat</p> <p>Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Pertama : Direktur PT BPR Harta Mandiri dapat kembali bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur PT. BPR Harta Mandiri dan dinyatakan negatif Covid-19 berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Awal Bros A. Yani.</p> <p>Kedua : Direktur Utama kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi</p>



			yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
11.	21 Mei 2021	3	Pengantian Biaya pengobatan Direksi an. Ali Syahbana
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	SIM ENGLIAN	11	0	100%
2.	SUAINIE	11	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris Selalu hadir saat rapat				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak terdapat Permasalahan Hukum yang Dihadapi tahun 2021		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Mei 2021	Sosial	Pemberian sembako kepada panti asuhan dalam rangka hari ulang tahun PT. BPR Harta Mandiri.	Panti Asuhan	Rp2.818.500,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian sembako kepada panti asuhan dalam rangka hari ulang tahun PT. BPR Harta Mandiri.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Harta Mandiri
 Alamat : JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru
 Nomor Telepon : (0761) 856756, (Hunting),32656
 Posisi Laporan : Desember 2021
 Modal Inti : Rp10.210.888.810,00
 Total Aset : Rp28.813.550.345,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Harta Mandiri Desember 2021, disampaikan hal hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	0.2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.06	0.159
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1	0.1
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.13	0.113
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	0.1
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)**
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.06)**
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**
Penanganan Benturan Kepentingan
- 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1)**
Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.13)**
Penerapan Fungsi Audit Intern
- 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1)**
Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**
Batas Maksimum Pemberian Kredit
- 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**
Rencana Bisnis BPR
- 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

C. Kesimpulan Umum


Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Analisis dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Pekanbaru, 14 April 2022

PT. BPR Harta Mandiri

Menyetujui



Jansen Lingga
Direktur Utama



Sim Eng Lian
Komisaris Utama